

KINERJA FISKAL PEMERINTAH DAERAH

**Studi Empiris pada 10 Wilayah
Kota Metropolitan di Indonesia**

Disusun Oleh

Sri Suharsih
Asih Sri Winarti

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UPN "Veteran" YOGYAKARTA
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia dapat diselesaikan.

Buku Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia merupakan luaran penelitian internal yang di biayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta yang berisi mengenai kinerja keuangan daerah dan studi empiris pada 10 Wilayah Metropolitan di Indonesia. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta dan semua pihak yang membantu penyelesaian buku ini yang tidak bisa Kami sebutkan satu persatu. Diharapkan dengan buku ini bisa digunakan sebagai acuan penelitian yang terkait dengan kinerja keuangan daerah serta menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja fiskal pada umumnya dan kinerja keuangan daerah pada khususnya. Penyusunan buku ini tidak lepas dari kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan buku ini

Akhirnya penyusun berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan khasanah keilmuan di bidang fiskal daerah dan semua pihak yang berkepentingan dengan manajemen keuangan daerah, Aamiin....

Yogyakarta, Oktober 2021
Penyusun

Sri Suharsih
Asih Sri Winarti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAGIAN 1. PERENCANAAN WILAYAH METROPOLITAN.....	4
BAGIAN 2. KAJIAN TEORITIS	6
2.1 Pembangunan Ekonomi Wilayah.....	6
2.2 Teori Basis Ekonomi.....	7
2.3 Teori Lokasi	9
2.4 Teori Tempat Sentral.....	10
2.5 Teori Kausasi Kumulatif	10
2.6 Teori Daya Tarik	10
2.7 Konsep Kawasan Metropolitan	11
2.8 Pembiayaan Pembangunan Daerah.....	11
BAGIAN 3. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH	14
3.1 Ruang Fiskal	14
3.2 Rasio Kemandirian Daerah	14
3.3 Derajat Otonomi Fiskal	16
3.4 Rasio Efektifitas	17
3.5 Rasio Efisiensi.....	18
3.6 Rasio Keserasian	19
3.7 Hubungan Variabel Makro Dengan Kinerja Keuangan Daerah	21
DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1 Skala Perbandingan dan Pola Hubungan Daerah Dengan Pemerintah Pusat	15
Tabel 3.2.2 Rasio Kemandirian Wilayah Metropolitan	15
Tabel 3.3.1 Derajat Otonomi Fiskal Wilayah Metropolitan	16
Tabel 3.4.1 Rasio Efektifitas Daerah Otonomi	17
Tabel 3.4.2 Rasio Efektifitas Wilayah Metropolitan	17
Tabel 3.5.1 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Otonom.....	18
Tabel 3.5.2 Rasio Efisiensi Wilayah Metropolitan	19
Tabel 3.6.1 Rasio Keserasian Wilayah Metropolitan.....	20

BAGIAN I

PENGANTAR PERENCANAAN WILAYAH METROPOLITAN

Sebagai upaya mengatasi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan peran wilayah metropolitan di Indonesia dengan melakukan optimalisasi peran dan fungsi metropolitan. Seperti diketahui, Pulau Jawa memiliki kontribusi ekonomi sebesar 59% terhadap PDB Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.

Strategi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah adalah meningkatkan peran Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan dalam mendukung pertumbuhan wilayah melalui perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan.

Upaya pengembangan wilayah metropolitan salah satunya dilandasi oleh hasil penelitian Bank Dunia yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi yang besar dan tingkat okupansi di wilayah urban terpadat di kawasan Asia Timur–Pasifik. Urbanisasi yang dikelola dengan baik, akan meningkatkan produktivitas, membuka peluang-peluang baru di bidang ekonomi. Selain itu hasil studi dari Bank Dunia tersebut menunjukkan bahwa kota-kota besar pada umumnya lebih produktif dan kompetitif secara ekonomi dibandingkan kota-kota kecil dan daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena adanya pemusatan faktor-faktor ekonomi di kawasan perkotaan yang dikenal sebagai aglomerasi.

Aglomerasi pada umumnya akan menyebabkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang terkonsentrasi pada kota-kota besar yang bermanfaat terhadap penghematan skala (*scale economies*), penghematan lokasi (*localization economies*) dan penghematan urbanisasi (*urbanization economies*). Di lain pihak, pengelolaan urbanisasi di Indonesia belum optimal, ditandai dengan data yang telah dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 yaitu penambahan 1 persen jumlah populasi penduduk urban, hanya dapat meningkatkan 1,4 persen PDB. Hal ini berbeda bila

dibandingkan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Negara Asia Timur dan Pasifik lain yang rata-rata kontribusi penduduk urban mencapai 2,7 persen PDB. Oleh karena itu, pada RPJMN 2020 - 2024 telah dirumuskan upaya optimalisasi pengembangan Wilayah Metropolitan agar tepat sasaran mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara inklusif yang diarahkan pada indikator perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi, pembiayaan investasi, pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan daya dukung lingkungan.

Pemerintah telah menetapkan 10 Wilayah Metropolitan (WM) untuk fokus dalam perencanaan terhadap konektivitas di dalam kawasan perkotaan yang terintegrasi menghubungkan tempat-tempat hunian dengan kawasan strategis ekonomi. Adapun rencana 10 WM yang akan dikembangkan sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024 adalah sebagai berikut: Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur); Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang) Jawa Barat; Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) Jawa Timur; Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), Jawa Tengah; Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo), Sumatera Utara; Patungagung (Palembang, Betung, Kayu Agung), Sumatera Selatan; Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala Tanah laut), Kalimantan Selatan; Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar), Sulawesi Selatan; Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), Bali; Bimindo (Bitung, Minahasa, Manado, Tomohon), Sulawesi Utara.

Dalam rangka mendukung pengembangan 10 wilayah metropolitan yang tersebar di Nusantara. Dalam upaya mendukung tercapainya pengembangan wilayah metropolitan diperlukan kajian teoritis dan empiris sebagai bahan kajian terhadap upaya Penguatan Daya Saing 10 Wilayah Metropolitan. Buku ini diharapkan dapat menjadi guidance serta memberikan masukan dalam pengembangan ekonomi wilayah terutama dalam rangka Penguatan Daya Saing 10 Wilayah Metropolitan.

BAGIAN II

KAJIAN TEORITIS

Pembangunan ekonomi dilaksanakan secara terpadu, selaras, seimbang dan berkelanjutan dan diarahkan agar pembangunan yang berlangsung merupakan kesatuan pembangunan nasional. Sehingga dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional perlu adanya pembangunan ekonomi daerah yang pada akhirnya mampu mengurangi ketimpangan antar daerah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata antar daerah.

Salah satu upaya untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan ekonomi di tingkat daerah, maka diperlukan suatu kawasan andalan yang berorientasi untuk mengembangkan potensi daerah. Menurut Royat (1996) dalam Kuncoro (2002:28) kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah, yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu provinsi atau kabupaten, memiliki sektor basis dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar.

2.1. Pembangunan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi wilayah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya, sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah atau daerah (Arsyad, 2002). Selanjutnya dikatakan pula, bahwa tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat yang ada di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal untuk membangun daerah demi menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu yang berorientasi pada proses tersebut meliputi pembangunan institusi baru, pembangunan industri alternatif,

pengembangan kapasitas tenaga kerja yang tersedia untuk menghasilkan produk yang lebih bagus, identifikasi pasar, alih teknologi dan mendirikan perusahaan maupun kooperat lainnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa karakteristik utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah penekanan pada pembangunan endogen yang menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, daerah untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Jinghan, M.L. (2004), proses pembangunan ekonomi ada empat (4) faktor yang menjadi modal pembangunan ;

1. sumber daya manusia (ketersediaan tenaga kerja, pendidikan dan motivasi)
2. sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar dan iklim)
3. pembentuk modal (mesin-mesin dan jalan raya)
4. tingkat teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen dan kewiraswastaan)

Dari keempat hal tersebut masing-masing mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan arah terhadap daerah tentang kebijaksanaan yang mengarah pada pertumbuhan daerah yang diinginkan.

2.2. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut (Tarigan,2005:28). Menurut Arsyad (2002), mengemukakan bahwa teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja (*job creation*) dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja dalam jangka panjang Selanjutnya dikemukakan bahwa teori basis ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi regional (daerah) yang sangat tergantung dari permintaan luar daerah akan produk-produk daerah tersebut. Lebih jelas dikatakan bahwa pertumbuhan atau penurunan

perekonomian suatu daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam mengekspor keluar daerah tersebut. Ekspor tersebut baik dalam bentuk barang maupun jasa termasuk tenaga kerja. Industri yang melakukan kegiatan ekspor disebut sektor basis. Apabila permintaan akan barang dan jasa meningkat (ekspor), dari daerah maka sektor basis akan berkembang dan pada gilirannya nanti perkembangan ini akan mendorong tumbuhnya sektor-sektor non basis. Dengan demikian akan terjadi peningkatan pendapatan, investasi, konsumsi dan kemampuan kerja di dalam daerah. Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 2002:116).

Teori basis ini digolongkan ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis merupakan sektor yang melakukan aktifitas berorientasi ekspor keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Sektor basis memiliki peran penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah semakin maju pertumbuhan wilayah. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis menimbulkan efek ganda dalam perekonomian regional. Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasaran bersifat lokal. Inti dari teori ini adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut.

Strategi pembangunan daerah yang muncul berdasarkan teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut. Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah digunakan analisis *Location Quotient* (LQ). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional. LQ

menggunakan rasio total nilai PDRB disuatu daerah (kabupaten/kota) dibandingkan dengan rasio PDRB pada sektor yang sama di wilayah referensi (provinsi/nasional).

2.3. Teori Lokasi

Alfred Weber seorang ahli ekonomi Jerman menulis buku berjudul *Uber den Standort der Industrien* pada tahun 1909. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1929 oleh C.J.Friedrich dengan judul *Alfred Weber's Theory of Location of Industries* (Tarigan, 2005:96). Teori yang dipelopori oleh Weber ini khusus untuk kegiatan industri pengolahan. Sehingga teori ini sangat terkait dengan pengembangan kawasan industri. Untuk lebih mendalami digunakan pendekatan *least cost analysis* dalam penerapannya. Teori ini mengemukakan mengenai perusahaan yang meminimumkan biaya dengan cara pemilihan lokasi yang strategis dan mendekati pasar. Strategis dalam arti mudah dala mendapatkan bahan baku dan mudah dalam distribusi barang atau jasa.

Analisis *least cost* ini didasarkan pada beberapa asumsi pokok yaitu lokasi pasar dan sumber bahan baku, sebahagian bahan baku adalah *localized materials*, tidak terjadi perubahan teknologi serta ongkos transportasi tetap. Weber menyimpulkan bahwa lokasi optimum dari suatu perusahaan industri umumnya terletak dimana permintaan terkonsentrasi atau sumber bahan baku. Bila suatu perusahaan industry memilih lokasi pada salah satu dari kedua tempat tersebut, maka ongkos angkut untuk bahan baku dan hasil produksi akan dapat diminimumkan keuntungan aglomerasi yang ditimbulkan dari adanya konsentrasi perusahaan pada suatu lokasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin (Emilia, 2006:16).

Banyak variabel yang mempengaruhi kualitas atau suitabilitas suatu lokasi misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat), kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya serta sanitasi (Arsyad, 2002:116).

2.4. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang berbatasan. Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman (Arsyad, 2002:117).

2.5. Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif (*cumulative causation*) ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperpanjang kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Maka dari itu kita mengenal ada yang disebut daerah maju dan daerah terbelakang. Daerah maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya. Inilah yang disebut sebagai *backwash effect* (Mrydal, 1957 dalam Arsyad, 2002).

Menurut model ini, ketimpangan pembangunan regional hanya akan dapat dikurangi melalui program pemerintah. Apabila hanya diserahkan pada mekanisme pasar, maka ketimpangan regional akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan (Sjafrizal, 2008:98).

2.6. Teori Daya Tarik (Attraction)

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif (Arsyad, 2002:118)

2.7. Konsep Kawasan Metropolitan

Pengertian tentang metropolitan sering dikenal dengan istilah ruang metropolitan (*metropolitan space*) yang merupakan suatu kawasan perkotaan yang memenuhi kriteria tertentu dengan manajemen perkotaan tertentu.

Wilayah Metropolitan (metropolitan region) adalah suatu wilayah bercirikan perkotaan yang meliputi dua atau lebih kota atau daerah yang berdekatan, terangkai dalam batas-batas administrasi dan memiliki jumlah penduduk keseluruhan melebihi satu juta jiwa. Wilayah metropolitan dihasilkan dari proses defragmentasi dari kawasan-kawasan perkotaan. *Koridor Perkotaan (metropolitan corridor)* adalah kawasan yang berciri perkotaan yang menghubungkan kawasan-kawasan metropolitan

Sesuai dengan pengertian di atas, maka deliniasi kawasan metropolitan dilakukan sebagai berikut :

1. Penentuan batasan fisik kota melalui identifikasi kawasan yang telah berfungsi sebagai kota (dominasi kegiatan pertanian dan permukiman) atau functional urban area (FUA) dari kota-kota untuk melihat penjalaran fisik kota.
2. Identifikasi kota-kota yang memiliki kecenderungan beraglomerasi dengan satu kota besar (yang berperan sebagai inti), yang dicirikan dengan kuatnya keterkaitan antar kota-kota tersebut dalam kegiatan ekonomi, transportasi, budaya, dan telekomunikasi
3. Identifikasi terhadap besarnya harian (komuter, aliran jasa, perdagangan dan finansial) yang terjadi antara kota utama dengan kota-kota disekitarnya
4. Satu kesatuan daya dukung fisik lahan terhadap pengembangan perkotaan seperti konsep greenbelt dan daerah hijau untuk keseimbangan lingkungan

2.8. Pembiayaan Pembangunan Daerah

Tujuan utama pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau kemakmuran masyarakatnya. Dari pengertian ini pembangunan mengandung banyak dimensi, karena kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa memiliki banyak indikator. Dalam paradigma tradisional, pembangunan ekonomi (*development economy*) adalah usaha untuk

meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan peningkatan kapasitas ekonomi suatu bangsa. Kapasitas ini diukur berdasarkan pendapatan total bruto misalnya PDB (Produk Domestik Bruto) untuk negara dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk wilayah regional.

Sementara itu, dalam paradigma baru, pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Paradigma baru ini memandang bahwa pembangunan yang paling hakiki mengandung tiga nilai inti atau komponen dasar, yaitu kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Kecukupan merupakan kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar agar masyarakat bisa hidup layak secara fisik. Kebutuhan dasar itu meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan (*World Development Report, 1997*).

Pelaksanaan pembangunan tersebut, secara teknis pemerintah ataupun pemerintah daerah harus melakukan berbagai kegiatan baik berupa pelayanan dan pengaturan publik, penyediaan barang dan jasa publik, penyediaan infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Untuk kegiatan yang demikian sudah barang tentu pemerintah memerlukan pembiayaan. Pembiayaan pengeluaran pemerintah tidak saja untuk membiayai kegiatan teknis, namun digunakan juga untuk instrument kebijakan ekonomi berupa instrument fiskal dan penyediaan infrastruktur. Sebagai instrument fiskal, pengeluaran pemerintah dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi permintaan. Sementara penyediaan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi agar lebih produktif dan efisien.

Secara teori, terdapat beberapa sumber pembiayaan pembangunan antara lain, pajak dan pungutan lain, keuntungan badan usaha, penjualan kekayaan negara, utang (dalam negeri ataupun luar negeri), hibah, maupun penerimaan lainnya. Menurut Bappenas (2013) terdapat beberapa potensi pengembangan sumber pendanaan pembangunan di luar pajak, antara lain pinjaman luar negeri tradisional, pinjaman dalam negeri, penebitan surat berharga, kerja sama pemerintah dengan swasta, dan memanfaatkan dana-dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Selain potensi-potensi tersebut, beberapa tahun terakhir berkembang pula berbagai inovasi pembiayaan pembangunan, terutama dalam skema internasional. Menurut Bank Dunia (2009), saat ini sedikitnya terdapat empat mekanisme pembiayaan pembangunan ekonomi negara, yaitu:

1. *Private mechanism: private-private* (swasta-swasta) yang berkembang di pasar maupun di masyarakat sipil
2. *Solidarity mechanism: sovereign-sovereign* (negara-negara) yang berbentuk multilateral dan bilateral baik berupa ODA (*Official Development Agency*) dan bentuk-bentuk lain atau OOF (*Other Official Flow*)
3. *PPP mechanism*: pengembangan atau mobilisasi dana swasta untuk membiayai dan mendukung layanan publik dan fungsi-fungsi publik lainnya, seperti *sovereign risk management*
4. *Catalytic mechanisms*: dukungan pendanaan publik untuk mengembangkan sektor swasta (*inter alia* untuk menurunkan risiko pasar).

Dari empat mekanisme tersebut, jika dikaitkan antara sumber dan pemakainya, tiga mekanisme sangat tergantung pada pemerintah (*official flow*).

Selain potensi-potensi tersebut, masih banyak potensi-potensi lain yang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pembiayaan dengan metode klasik yang mengandalkan pada pajak maupun utang tradisional, nampaknya banyak menemui kendala sehingga dalam era modern ini ada beberapa metode pembiayaan yang dikembangkan, dimana kebanyakan lebih mengarah pada peningkatan peranan swasta untuk membiayai pembangunan bahkan untuk membiayai pengantisipasi gejala perubahan iklim atau *climate change and carbon funding* (UNDP, 2012).

Meskipun sudah berkembang banyak konsep inovasi pembiayaan pembangunan, namun dalam kerangka pembangunan daerah, hal ini tentu tidak mudah diimplementasikan. Pola pembiayaan daerah harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAGIAN III

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH

Bagian ini menguraikan bagaimana cara mengukur kinerja keuangan daerah, beberapa tolok ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah diuraikan sebagai berikut:

3.1. Ruang Fiskal (*Fiscal Space*)

Mengacu kepada laporan *Fiscal Policy for Growth and Development* (World Bank, 2006) dinyatakan bahwa ruang fiskal (*fiscal space*) tersedia, jika pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya tanpa mengancam solvabilitas fiskal (*fiscal solvency*). Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005) mengemukakan bahwa ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurang pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Ruang fiskal bisa juga muncul dari peningkatan pendapatan di berbagai sektor dan penurunan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran di suatu daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Pemerintah daerah diharapkan memiliki terobosan untuk memanfaatkan ruang fiskal yang ada guna memacu pertumbuhan ekonomi. Ruang fiskal menunjukkan persentase ruang fiskal pada suatu provinsi. Caranya adalah dengan mengurangi pendapatan dengan pendapatan hibah dan belanja wajib di suatu wilayah dan dibagi dengan total pendapatannya.

3.2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian (RM) menggambarkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. RM dapat dihitung dengan cara

membandingkan besarnya PAD terhadap BPP. Artinya, semakin besar PAD suatu daerah dibandingkan dengan BPP yang diberikan, maka kemandirian daerah tersebut akan semakin baik. Skala perbandingan dan pola hubungan tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.1. Skala Perbandingan dan Pola Hubungan Daerah dengan Pemerintah Pusat

Skala Perbandingan Kemandirian (%)	Pola Hubungan
0 – 25 % (Rendah Sekali)	Instruktuf
25 – 50 % (Rendah)	Konsultatif
50 – 75% (Sedang)	Partisipatif
75 – 100% (Tinggi)	Delegatif

Sumber : Dirjen Perimbangan Daerah Kementerian Keuangan, 2006

Penggolongan RM didasarkan pada skala perbandingan dan pola hubungan daerah dengan pemerintah pusat. Skala perbandingan dan pola hubungan tersebut rasio kemandirian wilayah metropolitan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.2. Rasio Kemandirian Wilayah Metropolitan

No	Wilayah Metropolitan	Rasio Kemandirian
1	Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur):	123,23%
2	Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang)	46,71%
3	Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan)	77,70%
4	Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), Jawa Tengah	34,36%
5	Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo), Sumatera Utara	36,74%
6	Patungagung (Palembang, Betung, Kayu Agung), Sumatera Selatan;	23,42%
7	Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala Tanah laut)	24,22%
8	Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar	28,87%
9	Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)	239,23%
10	Bimindo (Bitung, Minahasa, Manado, Tomohon),	16,45%

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti dana perimbangan. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan wilayah metropolitan menunjukkan bahwa wilayah Jabodetabekpunjur, Gerbangkertosusila, dan Sarbagita memiliki angka rasio yang tinggi atau dapat mendanai kegiatan pemerintahan sendiri dan tidak terlalu bergantung pada peranan pemerintah pusat. Sementara wilayah Metropolitan yang memiliki rasio kemandirian terkecil adalah wilayah Biminda, Patungagung, dan Banjarbakula. Hal ini menandakan peranan pemerintah pada daerah tersebut terlihat masih dominan, atau dengan kata lain pemerintah daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

3.3. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Derajat Desentralisasi Fiskal (DOF) menggambarkan perbandingan antara PAD dengan TPD. Artinya semakin tinggi DOF suatu daerah, maka semakin baik daerah tersebut mengintensifkan penggunaan PAD nya.

Tabel 3.3.1. Derajat Otonomi Fiskal Wilayah Metropolitan

No	Wilayah Metropolitan	DOF
1	Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur):	41,32%
2	Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang)	23,30%
3	Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan)	29,79%
4	Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), Jawa Tengah	23,50%
5	Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo), Sumatera Utara	19,71%
6	Patungagung (Palembang, Betung, Kayu Agung), Sumatera Selatan;	13,98%
7	Banjarbakula (Banjarماسin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala Tanah laut)	17,57%
8	Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar	17,25%

9	Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)	48,67%
10	Bimindo (Bitung, Minahasa, Manado, Tomohon),	11,22%

Sumber: Analisis Data, 2021

Hasil kemampuan keuangan wilayah metropolitan diukur dengan Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Rasio DOF tertinggi secara berurutan diketahui di wilayah metropolitan Sarbagita, Jabodetabekpunjur, dan Gerbangkertosusila. Sedangkan wilayah yang memiliki DOF terendah yaitu wilayah Bimindo, Patungagung, dan Maminasata. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung terhadap pemerintah pusat baik melalui penerimaan pendapatan maupun penerimaan pembiayaan.

3.4. Rasio Efektifitas (RE)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 3.4.1. Rasio Efektifitas Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	<75

Sumber : Mahmudi (2010)

Tabel 3.4.2. Rasio Efektifitas Wilayah Metropolitan

No	Wilayah Metropolitan	Rasio Efektifitas
1	Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur):	109,55%
2	Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang)	111,32%
3	Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan)	110,19%

4	Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), Jawa Tengah	125,53%
5	Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo), Sumatera Utara	100,82%
6	Patungagung (Palembang, Betung, Kayu Agung), Sumatera Selatan;	91,34%
7	Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala Tanah laut)	111,06%
8	Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar	99,42%
9	Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)	100,52%
10	Bimindo (Bitung, Minahasa, Manado, Tomohon),	104,07%

Sumber : Analisis Data, 2021

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan. Rasio efektifitas tertinggi dimiliki wilayah Kedungsepur dan Bandung Raya sehingga kemampuan daerah tersebut dapat dikategorikan efektif karena melebihi target yang ditetapkan. Sementara itu wilayah metropolitan Maminasata memiliki angka rasio 99,42% sehingga belum dapat dikategorikan efektif.

3.5. **Rasio Efisiensi (REF)**

Rasio Efisiensi membandingkan realisasi belanja dengan total pendapatan yang diperoleh suatu wilayah. Secara umum seluruh wilayah metropolitan mampu mengoptimalkan realisasi belanja modal mendekati 100%.

Tabel 3.5.1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisien (%)
Sangat Efisien	<10
Efisien	10 – 20
Cukup Efisien	21 – 30
Kurang Efisien	31 – 40
Tidak Efisien	>40

Sumber: Mahmudi (2010)

Tabel 3.5.2. Rasio Efisiensi Wilayah Metropolitan

No	Wilayah Metropolitan	Rasio Efisiensi
1	Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur):	98,29%
2	Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang)	100,16%
3	Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan)	100,57%
4	Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), Jawa Tengah	101,47%
5	Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo), Sumatera Utara	100,34%
6	Patungagung (Palembang, Betung, Kayu Agung), Sumatera Selatan;	86,97%
7	Banjarmakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala Tanah laut)	122,89%
8	Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar	99,18%
9	Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)	101,19%
10	Bimindo (Bitung, Minahasa, Manado, Tomohon),	99,93%

Sumber : Analisis Data, 2021

Pada rasio efisiensi perhitungan diatas berdasarkan biaya perolehan dan realisasi pendapatan asli daerah dapat disimpulkan bahwa dari 10 wilayah metropolitan diatas mempunyai rasio efisiensi diatas 40 persen yang berarti berdasarkan kemampuan keuangan tidak efisien

3.6. **Rasio Keserasian (RK)**

Rasio keserasian merupakan rasio yang bertujuan untuk melihat aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Abdul Halim, 2002).

Tabel 3.6.1. Rasio Keserasian Wilayah Metropolitan

No	Wilayah Metropolitan	Rasio Keserasian	
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
1	Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur):	48,28%	51,72%
2	Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang)	54,15%	45,89%
3	Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan)	51,36%	48,73%
4	Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), Jawa Tengah	47,49%	32,55%
5	Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo), Sumatera Utara	53,91%	46,09%
6	Patungagung (Palembang, Betung, Kayu Agung), Sumatera Selatan;	56,44%	44,45%
7	Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala Tanah laut)	48,76%	52,18%
8	Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar	53,25%	48,82%
9	Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)	58,73%	41,27%
10	Bimindo (Bitung, Minahasa, Manado, Tomohon),	51,79%	47,26%

Sumber : Analisis Data, 2021

Berdasarkan rasio keserasian berdasarkan wilayah metropolitan diatas dari kontribusi jenis belanja daerah terhadap belanja daerah yang tertinggi rata-rata belanja tidak langsung yang mana terdapat 8 wilayah metropolitan. Hanya Jabodetabekpunjur dan Banjarbakula yang memiliki belanja langsung lebih tinggi dari pada belanja tidak langsung. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Belanja langsung diharapkan dapat mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung dikarenakan belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

3.7. Hubungan Variabel Makro dengan Kinerja Keuangan Daerah

Anggaran Indikator variabel ekonomi makro merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan baik Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi dasar dalam penggunaan biaya dalam pelaksanaan program-program negara disusun melalui berbagai indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro tersebut dijadikan tolak ukur sebelum menyusun anggaran yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh negara. Pada level Pemerintah Daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentu saja juga disusun dengan memperhatikan berbagai indikator variabel makro daerah.

Adapun indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, harga minyak internasional, dan produksi minyak Indonesia. Pada penelitian ini variabel makro yang akan digunakan adalah variabel yang berkaitan langsung dengan APBD, variabel nilai tukar, harga minyak dunia dan produksi minyak tidak digunakan dalam penelitian ini karena tidak terkait langsung dengan APB. Variabel makro yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, jumlah penduduk dan investasi.

1. **Pertumbuhan ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan hasil output yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi ini memengaruhi proses penyusunan APBD dengan dasar dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian

adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dengan melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, akan dapat dilihat gambaran terkait dengan komponen-komponen kegiatan yang dimasukkan ke dalam APBD.

2. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Oleh karena itu inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat. Dengan keadaan yang demikian, stabilitas APBD juga dipertimbangkan dengan tinggi atau rendahnya inflasi yang terjadi. Maka dari itu, inflasi menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun APBD.

3. Suku bunga

Tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel yang memengaruhi masyarakat dalam memilih bentuk kekayaan yang ingin dimilikinya, apakah dalam bentuk uang, financial asset, atau benda-benda riil seperti tanah, rumah, mesin, barang dagangan dan lain-lain. Mana yang memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi akan lebih diminati. Tingkat suku bunga digunakan sebagai salah satu variabel dalam kebijakan menyusun APBN serta APBD. Hal ini didasari bahwa suku bunga dapat menggambarkan kondisi perekonomian negara dengan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara.

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat penting sebagai wajib pajak. Karena pajak adalah gejala sosial, artinya pajak hanya terdapat di dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat berarti tidak ada pajak, sebab pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, hubungan antara pajak dan masyarakat erat sekali. Pajak-pajak di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk meratakan pendapatan dengan menerapkan tarif yang progresif (Soemitro, 1997:41).

5. Investasi

Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal (*capital stock*). Pengaruh investasi terhadap PAD sangat besar, apabila investasi dapat masuk ke dalam suatu daerah, dampaknya akan semakin luas terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemampuan masyarakat terhadap daya beli meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Sjafrizal (2012), **Ekonomi Wilayah dan Perkotaan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widowati (2014), “Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Rawa Pening”, **Jurnal Teknik PWK**, Volume 3 Nomer 1, 2014
- Atmaja, Arief Eka (2011), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang. **Undergraduate Thesis**, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Bank Diaun (2009), **Improving Access to Financial Services in Indonesia**, Desember 2009.
- Bappeda DIY (2016), Roadmap Keuangan Daerah, **Laporan Akhir Kajian**, tidak dipublikasikan
- Bappenas (2011), **Kerangka Rencana dan Pembiayaan Pembangunan**, www.bappenas.go.id/files/3313/./pembiayaan_20091008102540_2164_L.p
- Bappenas (2002), **Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD, dan Upaya Yang Dilakukan Daerah**, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, Bappenas, Jakarta
- Halim, Abdul, 2002, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Salemba Empat, Jakarta
- Heller, S Peter (2005), “Understanding Fiscal Space”, **IMF Policy Discussion Paper**, PDP/05/4, March 2005
- Heruyanto (2016), **Analisis Pengaruh Variabel Makro terhadap PAD Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**, UIN, Yogyakarta
- Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (2020), **Analisis Penguatan Daya Saing Kawasan Metropolitan di Indonesia**, Laporan Akhir, tidak di publikasikan
- Mahmudi, 2010, **Analisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Suharsih, Didit Welly Udjianto dan Astuti Rahayu (2016) **Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembentukan Kawasan Andalan**, Laporan akhir Penelitian Simlitabmas, Kemenristek Dikti

Undang-Undang Tahun 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang